

BAB II

**PERMASALAHAN RANJAU DARAT INTERNASIONAL
DAN SEJARAH PERKEMBANGAN *INTERNATIONAL
CAMPAIGN TO BAN LANDMINE (ICBL)***

Permasalahan ranjau darat telah membuat terjadinya krisis kemanusiaan di beberapa wilayah di dunia, namun para aktor-aktor internasional lain masih menutup mata atas permasalahan yang terjadi saat itu. Atas kesadaran tersebut ICBL hadir bersama para aktor lain yang bergerak bersamanya, sejak awal kehadirannya *International Campaign To Ban Landmine (ICBL)* dalam beberapa dekade yang lalu telah mampu menjadi magnet dalam kancah perjuangan perdamaian di dunia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya capaian yang telah di raih oleh ICBL dalam upaya perjuangan untuk menghentikan produksi dan penggunaan ranjau darat di dunia. Kehadiran ICBL merupakan bentuk respon kecemasan masyarakat internasional atas permasalahan yang selama ini masih sulit untuk di selesaikan. Di buat atas dasar tujuan yang mulia demi untuk mencapai kehidupan dunia yang bebas dari ancaman ranjau darat. Hingga hari ini sepak terjang keberhasilan kinerja ICBL telah banyak diakui oleh dunia internasional.

A. Masalah Global Ranjau Darat

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ranjau darat merupakan amunisi yang dirancang untuk diletakkan di dalam tanah atau di area permukaan tanah lainnya, amunisi ini akan meledak jika ada yang memicu detonatornya dapat melalui kontak dengan manusia atau hewan. Amunisi ini akan memberikan beberapa dampak, seperti melukai, melumpuhkan bahkan berujung pada kematian. Ranjau darat diketahui dapat aktif selama beberapa dekade pasca di tanam, maka tidak heran jika amunisi ini kerap membawa ancaman besar bagi

keselamatan manusia maupun makhluk hidup lainnya, meskipun konflik telah lama usai. Berdasarkan pengelompokannya, terdapat beberapa ranjau anti personel yang kerap digunakan.

Pertama, disebut dengan *Blast Mines* merupakan jenis ranjau darat yang terkubur di dalam tanah dan akan meledak jika seseorang menginjaknya. **Kedua**, jenis ini disebut dengan *Directional Fragmentation Mines* atau yang juga dikenal dengan ranjau fragmentasi terarah. Amunisi ini dirancang untuk diposisikan ke arah musuh yang akan mendekati wilayah pertahanan, biasanya digunakan oleh militer. Ranjau ini akan aktif setelah *tripwire* di picu, ia akan memproyeksikan fragmen logam ke arah tertentu. **Ketiga**, *Bounding Fragmentation Mines* di mana ranjau ini terkubur di dalam tanah yang memiliki pemicu berupa *tripwire* atau dengan diinjak mereka akan melompat ke udara dan meledak menyebarkan pecahan logam dalam busur 360 derajat. **Keempat**, *Fragmentation Mines* yang mana ranjau ini tersembunyi di atas area tanah vegetasi dan dipicu oleh *tripwire* yang akan menyebarkan fragmen logam dalam busur 360 derajat (Inna, 2010). Berikut ini merupakan contoh gambar dari ranjau yang telah dijelaskan di atas:



Gambar 2.1 *Blast Mines*



Gambar 2.2 *Directional Fragmentation Mines*



Gambar 2.3 *Bounding
Fragmentation Mines*



Gambar 2.4 *Fragmentation
Mines*

Sumber : Geneva International Centre for Humanitarian Demining. (2019)

Ranjau darat telah menjadi masalah isu kemanusiaan sejak tahun 1950-an ketika *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) mengidentifikasi mereka ke dalam “*Conventional Weapon Of Concern*”. Namun pada saat itu permasalahan ranjau darat tidak dipublikasikan secara global hingga *Asia Watch* dan *Physicians For Human Right* (PHR) mengeluarkan sebuah laporan agar menyerukan kepada dunia untuk menghentikan ranjau darat pada tahun 1991. Laporan ini dikenal dengan judul *A Coward’s War: Landmines In Cambodia*. Laporan ini berisi tentang efek ranjau darat hasil investigasi yang dilakukan di Kamboja dan Thailand. Laporan tersebut diberikan kepada pemerintah di mana yang bertindak sebagai instrumen penting untuk menyadarkan tentang akibat dari ranjau darat. Selain dari pada itu, munculnya berbagai macam NGO yang mengadvokasi isu ranjau darat membuat kampanye pelarangan ranjau darat menjadi isu fenomena global (Retener, 2015).

Pada awal tahun 1990-an, *The International Committee Of The Red Cross* (ICRC) menyatakan bahwasanya ranjau darat anti personil telah mengakibatkan terjadinya krisis medis, kemanusiaan, dan sosial atau dalam istilah medisnya dikatakan bahwa ranjau darat telah mengakibatkan “*epidemic*” cedera bahkan berujung kepada kematian dan penderitaan parah lainnya. Luka-luka yang disebabkan oleh ranjau anti-personil sangat mengerikan, dan para ahli bedah pun mengakui bahwa korban ranjau ialah pasien yang paling sulit untuk diobati. Mereka yang selamat dari ledakan ranjau biasanya menderita karena terdapat anggota tubuh yang hancur dengan membutuhkan tindakan amputasi, beberapa operasi dan rehabilitasi fisik yang berkepanjangan akibat trauma yang dialami. Mereka yang menderita cacat permanen dan implikasi sosial, psikologis, dan ekonomi dari disabilitas. Efek dari ranjau anti-personil tidak terjadi secara kebetulan, karena senjata ini dirancang khusus untuk menghancurkan anggota tubuh dan kehidupan yang tidak dapat diperbaiki kembali (International Committee Of The Red Cross, 2007).

Dalam skala global krisis akibat dari ranjau darat mempengaruhi banyak negara di Afrika, Amerika, Asia, dan Eropa. Namun masalah yang sangat berbahaya juga berdampak bagi lingkungan dan keberlangsungan pembangunan di negara berkembang. Sebagian besar dari negara yang paling terkena dampak ranjau merupakan negara dengan kategori negara paling tidak berkembang dan termiskin. Hal ini dapat dilihat pada laporan *Human Development Report* pada tahun 2004, negara-negara tersebut seperti Somalia, Sudan, Eritrea, Mozambique, Kroasia, Bosnia, Kamboja, Iraq, Afganistan, dan Agola. Kebanyakan dari masyarakat di negara tersebut hidup berdampingan dengan ranjau darat, bahkan terbiasa dengan kondisi tersebut. Sepertiga dari semua negara berkembang mengalami krisis akibat ranjau darat dengan porsi yang berbeda, namun negara Afrika yang memiliki masalah serius akibat dari ranjau darat (Berhe, 2006).

Dalam banyak kasus yang disebabkan oleh ranjau darat, dampak serius kerap muncul di bidang ekonomi dan bidang sosial, di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, ekonomi dalam hal ini dapat dilihat dari segi pertanian yang merupakan sumber kehidupan masyarakat di negara berkembang para petani mengeluhkan karena pertumbuhan gulma dan kekurangan irigasi, meningkatnya jumlah tikus yang menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian, hewan peliharaan menjadi korban ranjau darat, dan di tambah lagi dengan terbatasnya akses ke lahan pertanian akibat dari ranjau darat dengan adanya kejadian tersebut tentu mengganggu stabilitas ekonomi.

Kedua sosial sebagian besar korban ranjau darat merupakan masyarakat sipil dan bukan militer korban ranjau darat tidak hanya terjadi di negara konflik bahkan di negara yang damai hal ini merupakan ranjau darat hasil warisan masa lalu, korban ranjau darat kerap kali menjadi korban bagi masyarakat dan keluarga karena mereka hidup dengan kondisi fisik yang cacat, dan dapat mempengaruhi jumlah populasi penduduk (Ahmed, 2014). Dalam beberapa kasus juga dilaporkan bahwa sebagian besar korban ranjau darat harus menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penyebaran ranjau darat yang luas di beberapa wilayah membuat bantuan kemanusiaan internasional mengalami hambatan karena dapat mengancam para pekerja pengirim bantuan tersebut dan jika melalui jalur udara maka bisa meningkatkan biaya sampai dengan dua puluh lima kali lebih tinggi dari jalur darat (Nicolas E. Walsh, 2003).

Masyarakat sipil yang menjadi korban ranjau darat sebagian besar merupakan anak-anak usia sekolah, di beberapa negara tercatat anak-anak yang menjadi korban ranjau darat kerap kali harus mengakhiri pendidikan mereka hal ini disebabkan karena dibutuhkan waktu lama untuk penyembuhan yang disebabkan oleh ranjau darat selain itu

juga beban keuangan yang ditanggung keluarga membuat mereka harus putus sekolah. Tidak hanya sampai disitu saja permasalahan lain yang dihadapi juga seperti kurangnya dukungan psikologis yang untuk anak-anak yang menderita trauma akibat dari ranjau darat, kerap terjadi diskriminasi bagi anak-anak penyandang disabilitas di lingkungan sekolah ikut serta memperparah keadaan sehingga menghilangkan motivasi anak-anak untuk melanjutkan pendidikannya (Shah, 2008).

Jika dilihat dari perspektif ekologis ranjau darat juga menyebabkan kerusakan pada tanah, flora dan fauna. Ledakan dari ranjau darat menyebabkan kerusakan pada struktur tanah dan meningkatkan resiko tanah terhadap erosi, sehingga mempengaruhi tingkat kelembapan tanah, erodibilitas dan produktivitas tanah. Hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah tertentu akibat dari rusaknya tutup vegetasi selama ledakan atau kegiatan penambangan, tidak sedikit dari hewan yang terancam punah menjadi korban dari ranjau darat. Beberapa hewan tersebut diantaranya beruang coklat di Kroasia, macan tutul berawan, macan tutul salju, dan harimau Bengal di India, gajah di beberapa bagian Afrika dan Sri Lanka, macan tutul di Afganistan. Dan beruang coklat di beberapa kawasan Eropa (S. Roberts, 1995).

Kekhawatiran akan ranjau darat terlihat dengan banyaknya peristiwa jangka panjang yang di akibatkan oleh ranjau darat di seluruh dunia. Namun disisi lain pada saat itu Negara tidak punya kewajiban untuk membersihkan ranjau darat yang tertanam dikarenakan tidak adanya kewajiban yang mengatur hal tersebut di bawah hukum humaniter internasional pada saat itu. Berdasarkan berbagai laporan oleh beberapa NGO menyebutkan terdapat sekitar seratur dua puluh juta ranjau darat yang masih tertanam di seluruh dunia sebelum diadakannya Konvensi Ottawa (US Department Of State, 2001).

Dana yang dikeluarkan untuk membuat sebuah ranjau hanya sekitar tiga dolar AS namun butuh ribuan dolar untuk membersihkan sisa ranjau tersebut. Daerah yang paling banyak memiliki ladang ranjau darat ialah negara berkembang pemerintah di negara tersebut tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memberihkan ranjau darat serta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya ranjau darat. Selain dari pada itu warga sipil yang menjadi korban ranjau darat kerap kali tidak memiliki akses perawatan yang baik yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan anggota tubuh mereka bahkan berujung pada kematian. Maraknya kasus yang diakibatkan oleh ranjau darat di negara-negara berkembang membuat beberapa NGO di seluruh dunia tergerak untuk melakukan tindakan demi menyelamatkan kehidupan masyarakat dari bahaya ranjau darat, gerakan inilah yang pada akhirnya akan mengilhami terlaksananya Konvensi Ottawa yang memberlakukan aturan larangan ranjau darat secara global (Retener, 2015).

B. Sejarah Berdirinya *International Campaign To Ban Landmines* (ICBL)

ICBL merupakan kekuatan penting di balik terciptanya gerakan pelarangan ranjau darat internasional. Koalisi ini telah bertransformasi menjadi kekuatan baru dalam dunia internasional hal ini dapat dikatakan karena koalisi ini telah memayungi lebih dari seribu NGO di seluruh dunia, tetapi dibalik itu semua ada sosok yang turut berjasa dalam menciptakan ICBL. Bobby Muller yang berasal dari *Vietnam Veterans Of America Foundation* (VVAFA) berbasis di Amerika Serikat dan Thomas Gabeur yang berasal dari *Medico International* (MI) yang berbasis di Jerman atas dasar rasa keprihatinan akan dampak dari ranjau darat yang menyita perhatian mereka, keprihatinan Muller muncul pasca mengunjungi kamboja pada tahun 1987 di mana pada saat itu dipenuhi oleh ranjau darat dan Gabeur terpengaruh akibat dari ranjau darat di Amerika Tengah pasca bertugas di sana. Pasca

melakukan pertemuan keduanya sepakat untuk membuat gerakan dalam upaya melarang ranjau darat secara global dengan dibantu oleh Jody Williams yang memulai kampanye di Amerika Serikat dan Angelika Beer untuk berkampanye di Jerman (Mekata, 2000, pp. 145-146).

Selang setahun pasca pertemuan tersebut tepatnya pada oktober 1992 ada enam NGO yaitu *Handicap International, Human Rights Watch, Medico International, Mines Advisory Group, Physicians for Human Rights, and Vietnam Veterans of America Foundation* melakukan pertemuan di New York semua NGO tersebut berkomitmen bersama – sama untuk berjuang melawan ranjau darat pada saat itu di namailah gerakan kampanye tersebut dengan International Campaign to Ban Landmine dengan menunjuk Joddy William sebagai koordinatornya (International Campaign To Ban Landmines, 2012). Pasca pertemuan tersebut ICBL secara resmi meluncurkan tiga poin utama dalam kampanye ranjau darat. Pertama larangan secara menyeluruh terhadap penggunaan, produksi, perdagangan, dan penimbunan ranjau darat anti personil, kedua peningkatan sumber daya untuk pembersihan ranjau sarat dan ketiga peningkatan sumber daya untuk bantuan korban ranjau darat (Williams J. , 2013).

International Campaign to Ban Landmines mempelopori dilaksanakannya pertemuan NGO Internasional pertama yang diadakan pada tahun 1993 di London. Konferensi ranjau darat tersebut dihadiri oleh 50 orang perwakilan dari 40 NGO, semuanya sepakat untuk bekerja bersama – sama dalam memperjuangkan isu ranjau darat di dunia internasional. Selaku koordinator ICBL Joddy William menyatakan bahwa kampanye-kampanye ini lahir dari ladang ranjau, kampanye ini lahir dari rasa kemanusiaan yang dalam akibat dari keprihatinan terhadap bahaya yang selama ini mengintai kehidupan kita harus menyadari bahwa sumber akar masalah ini merupakan ranjau darat yang membunuh tanpa

pandang bulu. Joddy William juga menekankan bahwa tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika seluruh elemen bekerja bersama – sama (Faulkner, 2007). Pertemuan inilah yang nantinya akan berlanjut dengan dilaksanakannya *The Convention On The Prohibition Of The Use, Stockpiling, Production and Transfer Of Anti-Personnel Mines And Their Destruction* atau yang lebih dikenal dengan *Ottawa Treaty* pada September 1997.

International Campaign to Ban Landmines merupakan NGO terdesentralisasi fleksibel yang dikelola suatu komite koordinasi saat ini terdiri dari 13 organisasi yaitu *Danchurch Aid, Lutheran World Federation, Handicap International, Human Right Watch, Kenya Coalition Against Landmines, Landmine Survivor Network, Mine Action Canada, Norwegian People's Aid, dan The Afghan, Brazilian, Cambodia, Italian, And Sri Lankan Campaigns To Ban Landmines*. Sejak tahun 1999 kantor pusat koordinasi ICBL berada di Washington DC yang berfokus kepada koordinasi kampanye, distribusi sumber daya, dan proyek pemuda. Kantor lain berlokasi di Paris, Prancis yang berurusan dengan hubungan internasional dengan pemerintah dan organisasi multilateral (Berhe, 2005).

Sejak awal berdirinya hingga hari ini ICBL telah memiliki jaringan lebih dari 1.300 NGO internasional yang tersebar di berbagai wilayah bekerja dalam skala lokal, nasional, regional, dan internasional. ICBL juga tercatat aktif di 99 negara di dunia dalam menjalankan berbagai misi kemanusiaan, ICBL telah menjadi pelopor dalam upaya advokasi NGO dengan menjalankan strategi aliansi antar sesama NGO dan negara-negara yang mendukung gerakan mereka (Dayringer, 2007). Maka tak heran pada tahun 1997 ICBL melalui koordinatornya pada saat itu Joddy Williams menerima nobel penghargaan perdamaian, *The Norwegian Nobel Committee* mengatakan bahwa ICBL berhak menerima penghargaan tersebut karena telah berhasil membuat larangan ranjau darat secara global yang semula hanya visi namun

menjadi kenyataan dengan memperoleh penghargaan tersebut semakin menambah keyakinan masyarakat internasional akan kontribusi dari ICBL dalam mewujudkan perdamaian (Clancy, 1997).

C. Struktur Organisasi *International Campaign To Ban Landmines* (ICBL)

ICBL terbagi dalam beberapa struktur kepengurusan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, disebut dengan *Ambassadors* yaitu bertugas sebagai perwakilan dari ICBL yang bertindak sebagai juru bicara untuk menghadiri berbagai forum. Anggotanya terdiri dari Jody William, Tun Charanneth, Margaret Arach Orech, Song Kosal yang bertugas selaku Youth Ambassador. Masing-masing dari mereka memiliki tupoksi tugas tersendiri dengan latar belakang kehidupan yang berbeda (International Campaign To Ban Landmines, 2012).

Jody Williams adalah seorang aktivis yang berasal dari amerika serikat. Ketika ia menjadi relawan di el savador yang pada saat itu dilanda perang, ranjau darat menjadi salah satu ancaman bagi warga sipil ia membantu bertugas membantu para korban ranjau darat dengan menyediakan anggota tubuh buatan bagi mereka seperti kaki, lengan yang kebanyakan dari korban merupakan anak-anak, sejak 1991 Jody Williams terus mendorong dan mengkampanyekan peluncuran kampanye melarang ranjau darat. Berkat kegigihan dan bakat organisasinya Jody Williams memperoleh banyak penghargaan salah satunya nobel perdamaian tahun 1997 bersama ICBL organisasi yang dipimpinya, majalah forbes pada tahun 2004 juga menobatkannya sebagai salah satu dari seratus wanita kuat di dunia. Saat ini Williams kerap kali di undang untuk memberi kuliah tentang dampak ranjau darat dan juga menulis beberapa buku terkait hal yang selama ini diperjuangkannya (Luebering, 2014).

Margaret Arach Orech merupakan seorang perempuan pejuang kemanusiaan yang berasal dari Uganda ia juga direktur *Uganda Landmine Survivor Association* (ULSA) di beberapa kesempatan ia selalu mengatakan

“I used what happened to me as my stepping stone for starting peace-related activities. I didn’t want what happened to me to happen to others. I became a voice of the people injured by the lack of peace that we talk so much about. It’s like the wounded person becoming a healer for other wounded souls.”

Sebagai duta ICBL ia juga terus menyoroti keadaan para korban ranjau darat dan mengadvokasi hak mereka (Williams J. , 2017).

Tun Charanneth adalah seorang korban ranjau darat ia harus menjalani sisa hidupnya dengan kehilangan kedua kakinya. Namun bukan berarti ia harus menyerah terhadap hidupnya ia menjadi salah satu duta ICBL yang mewakili suara para korban ranjau darat. Selain itu ICBL juga memiliki *Youth Ambassador* yaitu Song Kosal merupakan salah satu korban ranjau darat ketika usia enam tahun ia harus kehilangan kaki sebelah kanannya. Sebagai duta muda ICBL song kosal telah berhasil memperlihatkan kepada dunia bahwa menjadi korban juga dapat memberi kontribusi bagi orang lain (International Campaign To Ban Landmines, 2012).

Kedua, disebut dengan *staff team* yang bertugas menjalankan mekanisme organisasi dalam ICBL, yaitu Hector Guerra menempati posisi sebagai *Director*, Amelia Chayer sebagai *Government Liaison And Policy Manager*, Patric Teil sebagai *Finance Director*, Éléa Boureux sebagai *Operations And Administration Manager*, Jeff Abramson sebagai *Landmine And Cluster Munition Program Manager* (International Campaign To Ban Landmines, 2016).

D. Tujuan dan Arah Perjuangan *International Campaign To Ban Landmines (ICBL)*

Sejak didirikan pada tahun 1992, ICBL telah menjadi instrumen penting dalam perjuangan untuk mengangkat isu ranjau darat ini. Hal ini terbukti dengan berhasilnya diadakan *Ottawa Convention* yang menjadi instrumen penting dalam melahirkan rezim ranjau darat. Pasca pertemuan yang dilaksanakan di New York tersebut, ICBL secara resmi meluncurkan tiga poin utama dalam kampanye ranjau darat. Pertama larangan lengkap tentang penggunaan, produksi, perdagangan, dan penimbunan ranjau darat anti personil, Kedua peningkatan sumber daya untuk proyek pembersihan ranjau darat, ketiga peningkatan sumberdaya terhadap bantuan para korban ranjau darat. ICBL berpandangan bahwa senjata ranjau darat telah melanggar hukum humaniter internasional (Williams J. , 2013, p. 163).

Konsistensi dari ICBL untuk selalu mengkampanyekan pelarangan penggunaan, produksi, menimbun dan memperdagangkan anti personil mines, Kembali dipertegas pada rapat umum ICBL yang dilaksanakan pada february tahun 1998 di Frankfurt, Jerman, dalam pertemuan tersebut lahirlah sebuah langkah prioritas sebagai pilar fundamental dalam perjuangan ICBL, mereka menamakan dengan *Campaign's Three Fundamental Pillar Of The Ban, Mine Action And VictimAssistance*. Terdapat beberapa poin penting, di antaranya **pertama**, bekerja untuk meningkatkan jumlah anggota yang meratifikasi perjanjian ranjau darat. **Kedua**, meningkatkan monitor terhadap ranjau darat. **Ketiga**, mempromosikan dan meningkatkan pendanaan untuk program kerja ranjau darat. **Keempat**, peningkatan bantuan terhadap ranjau darat secara komperhensif. **Kelima**, meningkatkan peran serta aktor non negara untuk berkomitmen terhadap pelarangan ranjau darat. **Keenam**, fokus terhadap masalah tanggung jawab moral dan hukum (Marino, 1999). *International Campaign to Ban Landmines*

menyadari bahwa pentingnya fokus terhadap tujuan dan strategi demi tercapainya tujuan yang selama ini di harapkan. Dukungan terhadap korban ranjau darat terus ditingkatkan oleh ICBL melalui program bantuan alokasi dana bagi para korban, ICBL menyadari bahwasanya dana program selama ini lebih banyak dialokasikan terhadap proyek pemberantasan ranjau darat di ladang ranjau selain itu ICBL juga terus melalui upaya dengan mempublikasikan bahaya ranjau darat, melalui laporan pemantauan ranjau darat dan cluster munition, yang di dapat melalui jaringan peneliti di seluruh dunia. Catatan fakta tentang kondisi di lapangan dan laporan tahunannya merupakan alat penting untuk memantau kepatuhan terhadap Perjanjian Pelarangan Ranjau darat (Williams, 2017).